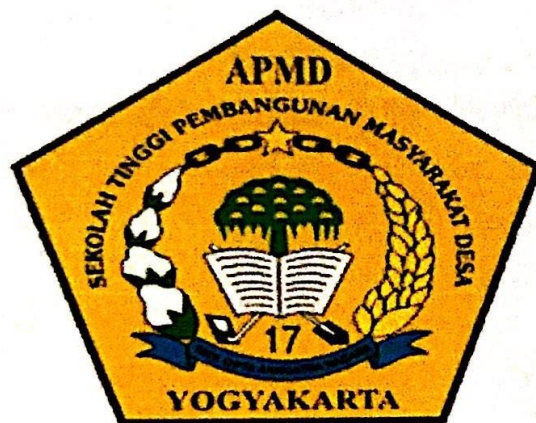


**UPAYA PEMERINTAHAN DESA DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI DI MASA
PANDEMI COVID-19 DI KALURAHAN SRIMARTANI, KAPANEWON PIYUNGAN,
KABUPATEN BANTUL**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

Farid Sulaiman

17520248

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA**

2022

i



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 8 Februari 2022
Jam : 12.00 WIB
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD "APMD" Yogyakarta

Nama

Tanda Tangan

1. Utami Sulistiana, S.P.,M.P
Ketua Penguji/Pembimbing



2. Ir. Nelly Tiurmida, MPA
Penguji Samping I



3. Rr. Leslie Retno Angeningsih, Ph.D
Penguji Samping II



NIM: 17520248

SURAT PERNYATAAN



Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Farid Sulaiman
NIM : 17520248
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul “Upaya Pemerintahan Desa Dalam Pemberdayaan Ekonomi Di Masa Pandemi *Covid-19* di Kalurahan Srimartani, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul” ini merupakan karya saya sendiri. Adapun yang bukan karya saya dalam Skripsi ini telah disebutkan dalam teks dan tercantum dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 11 Februari 2022

Yang Membuat Pernyataan

Farid Sulaiman

NIM: 17520248

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT. atas segala limpahan rahmat dan karuniannya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“UPAYA PEMERINTAHAN DESA DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI DI MASA PANDEMI *COVID-19* DI KALURAHAN SRIMARTANI, KAPANEWON PIYUNGAN, KABUPATEN BANTUL”**.

Dalam menyelesaikan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari dukungan, bimbingan dan juga bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, dengan segala rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta.
3. Ibu Dra.Herawati, MPA selaku Dosen Wali yang telah membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan perkuliahan ini.
4. Ibu Utami Sulistiana, S.P.,M.P selaku Dosen Pembimbing/Ketua Penguji Skripsi.
5. Ibu Ir. Nelly Tiurmida, MPA selaku Dosen Penguji I Skripsi.
6. Ibu Rr. Leslie Retno Angeningsih, Ph.D selaku Dosen Penguji II Skripsi.
7. Seluruh Dosen Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
8. Seluruh jajaran Pemerintahan dan Masyarakat Kalurahan Srimartani, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul.yang telah membantu dan mengizinkan penulis melakukan penelitian di Kalurahan Srimartani.
9. Seluruh sahabat yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan dan doanya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan-masukan dari siapapun yang tujuannya untuk kebaikan bersama. Penulis juga berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapapun.

Yogyakarta, 8 Februari 2022

Penulis

Farid Sulaiman

NIM: 17520248

MOTTO

“Janganlah kamu bersuka cita, sesungguhnya Allah selalu bersama kita”

(QS. At-Taubah:40)

"Tidak ada dua hal yang digabungkan lebih baik dari pada pengetahuan dan kesabaran"

(Nabi Muhammad SAW)

“Tanpa tindakan, pengetahuan tidak ada gunanya dan pengetahuan tanpa tindakan itu sia-sia”

(Abu Bakar As-Siddiq)

“Tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan”

(Umar Bin Khattab)

Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak butuh itu. Dan yang membencimu tidak percaya itu”

(Utsman Bin Affan)

“Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan mau menguji kekuatan akarnya”

(Ali Bin Abi Thalib)

Berbuat baiklah selalu dan jadilah bermanfaat untuk orang lain”

(Bapak Abdul Hamid)

“Hidup adalah pilihan ganda yang harus di jawab dengan baik dan benar”

(Farid Sulaiman)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dalam menyelesaikan Skripsi ini, tentunya tidak terlepas dari doa maupun dukungan dari berbagai kalangan. Oleh karena itu, dari lubuk hati yang paling dalam penulis mengucapkan terima kasih banyak. Dan Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Abdul Hamid dan Ibu Bayang, atas cinta, doa dan juga dukungan yang tak terhingga diberikan kepada saya. Kalian segalanya.
2. Adik dan Kakak saya, Darwis, Sarwan Hamid, Astuti, Puji Wirawati dan Saiful Jamil.
3. Sahabat saya Muhamad Iksan, Baharudin Yasin, Saharudin, Irwan Syafi'i, Hendrawan Kartiko, Ismail, Hardiansyah, Jamal, Ihsan Faqqihudin, Erwin Rangga Brani, Mumun, Refani Aziz, Mode Nafijai, Abang Walid, Abang Igon, Wisnu Almahendra, Ansarudin, Suaib dan seluruh sahabat-sahabat saya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih banyak. Kalian luar biasa.
4. Keluarga besar Kampung Lemes, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.
5. Keluarga besar IKMMIKOM-Y.
6. Komunitas SEKOLAH BEBAS.
7. STPMD "APMD" Yogyakarta, yang telah menjadi tempat untuk saya belajar dan berproses.
8. Pemerintah dan Masyarakat Kalurahan Srimartani, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul yang telah membantu dan memberikan ijin kepada saya untuk melakukan penelitian di Kalurahan Srimartani.

INTISARI

Ditengah situasi pandemi *Covid-19* yang membawa banyak dampak bagi kehidupan masyarakat terutama berdampak pada sektor ekonomi, pemberdayaan merupakan hal yang sangat penting adanya. Pemberdayaan ekonomi ini merupakan suatu upaya yang dilakukan melalui berbagai kegiatan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan, pengembangan pengetahuan, penguatan kemampuan atau potensi yang mendukung agar dapat terciptanya keberdayaan, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan desa sebagai penanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa tentunya harus mengetahui keadaan dan apa yang harus dilakukan atas keadaan yang sedang terjadi tersebut. Oleh karena itu penelitian ingin meneliti tentang bagaimana upaya pemerintahan desa dalam pemberdayaan ekonomi di masa pandemi *Covid-19*. Lokasi dalam penelitian ini adalah Kalurahan Srimartani, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul. Yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pemerintahan desa dalam pemberdayaan ekonomi di masa pandemi *Covid-19* di Kalurahan Srimartani.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan metode penelitian secara eksplorasi. Subjek dari penelitian ini berjumlah 10 orang yang terdiri dari Lurah/Kades, Perangkat Kalurahan/Desa dan Kepala Dukuh. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi data. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintahan Kalurahan Srimartani dalam pemberdayaan ekonomi di masa pandemi Covid-19 ini adalah dengan mengadakan berbagai macam program, kegiatan maupun pelatihan. Program-pogram ataupun kegiatan-kegiatan tersebut tercantum dalam RPJMDes Kalurahan Srimartani Tahun Anggaran 2021. Hal-hal yang menjadi tujuan dalam program maupun kegiatan tersebut adalah untuk meningkatkan keterampilan, perekonomian, kemandirian juga kesejahteraan masyarakat. Selain itu adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya Covid-19 serta meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan Kalurahan Srimartani guna untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan Kalurahan kepada masyarakat.

Kata Kunci : Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Ekonomi

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Seperti yang diketahui bahwasannya sekarang dunia sedang dilanda oleh sebuah wabah, yaitu pandemi *Covid-19*. Pandemi ini membawa banyak dampak bagi kehidupan manusia. Demikian halnya dengan Indonesia. Tercatat hingga tanggal 8 November 2021, total masyarakat Indonesia yang terpapar *Covid-19* sebanyak 4.248.409 orang. Dan yang meninggal dunia akibat terpapar pandemi *Covid-19* ini sebanyak 143.557 orang (Kemenkes RI, 8 November 2021). Disisi yang lain, ditengah situasi pandemi *Covid-19* ini juga pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung mengalami penurunan dan lambat. Di tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu mencapai 5,02% (bps.go.id). Sedangkan di tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi ditahun sebelumnya. Di tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 2,07% (bps.go.id). Artinya pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 mengalami penurunan 2,95% jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2019. Dan di tahun 2021 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2020 adalah 2,07% dan di tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Indonesia yaitu 3,69% (bps.go.id). Artinya pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 hanya mengalami kenaikan sebesar 1,62%.

Dalam laporan *World Bank Country Classifications by Income Level: 2021-2022*, Bank Dunia menyebutkan bahwa pendapatan per kapita Indonesia mengalami penurunan dari US\$4.050 di tahun 2019 menjadi US\$3.870 di tahun 2020 (Kemenkeu RI, 8 Juli 2021). Hal ini tentunya tidak terlepas dari dampak adanya pandemi *Covid-*

19. Menurut Ridho Al Izzati (2021), permasalahan pertumbuhan perekonomian Indonesia yang melambat dipengaruhi oleh semakin banyaknya populasi yang terinfeksi *Covid-19* (termasuk populasi produktif). Oleh karena itu situasi ini mengurangi kemampuan rumah tangga mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, terutama bagi rumah tangga yang terdampak langsung oleh pandemi *Covid-19*.

Melihat keadaan ini pemerintah mengeluarkan berbagai macam kebijakan. Diantaranya adalah kebijakan PPKM. Adanya kebijakan PPKM ini berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021. Sebelumnya pemerintah juga mengeluarkan kebijakan PSBB. Tujuan dari kebijakan-kebijakan tersebut merupakan bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi resiko penularan dan memutuskan mata rantai *Covid-19*. Sedangkan dalam hal pemulihan ekonomi, pemerintah mengeluarkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program ini ditetapkan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program PEN dan PP Nomor 43 Tahun 2020 tentang perubahan Atas PP Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program PEN.

Pandemi *Covid-19* memang membawa banyak dampak bagi kehidupan manusia di dunia ini. Demikian juga untuk negara Indonesia. Hampir semua lapisan masyarakat merasakan dampaknya. Mulai dari tingkat nasional hingga masyarakat desa. Di Kalurahan Srimartani dampak dari adanya pandemi *Covid-19* ini banyak masyarakat yang terkena kasus *Covid-19*. Berdasarkan data yang disampaikan oleh pihak Kalurahan pada saat peneliti melakukan observasi, total kasus *Covid-19* di Kalurahan Srimartani sebanyak 668 kasus. Dan yang meninggal dunia akibat terpapar *Covid-19* ini sebanyak 35 orang. Masalah yang lainnya adalah pada sektor ekonomi. Dimana menurut informasi yang di dapatkan oleh peneliti pada saat melakukan observasi banyak usaha-usaha masyarakat di masa pandemi ini mengalami penurunan

penghasilan atau pendapatan. Seperti misalnya usaha kios, usaha ikan lele, hasil pertanian dan lain sebagainya. Menurut informasi yang didapatkan bahwa terjadinya penurunan penghasilan maupun pendapatan masyarakat ini disebabkan oleh adanya pandemi *Covid-19*. Dimana dengan adanya pandemi ini banyak kasus *Covid-19* yang terjadi dan diikuti dengan adanya kebijakan PPKM yang dikeluarkan oleh pemerintah sehingga masyarakat yang memiliki usaha mikro, kecil dan menengah seperti warung makan, kios dan lain sebagainya tersebut dibatasi jam bukannya. Akibatnya usaha mikro, kecil dan menengah tersebut tidak beroperasi secara 100% dari kapasitas optimalnya. Sedangkan untuk masyarakat yang terpapar *Covid-19* diharuskan menjalani isolasi mandiri dan tidak boleh melakukan aktifitas diluar. Sehingga menyebabkan orang tersebut tidak bekerja. Hal ini tentunya berdampak pada ekonomi masyarakat tersebut.

Persoalan diatas tentunya dibutuhkan sebuah upaya untuk mengatasinya. Upaya yang dimaksud adalah bentuk usaha ataupun kegiatan yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan ataupun memecahkan sebuah persoalan dengan menghadirkan sebuah solusi. Oleh karena itu, pemerintah desa sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan urusan pemerintahan desa harus berupaya untuk melakukan sesuatu agar persoalan tersebut dapat teratasi dan mendapatkan jalan keluarnya.

Seperti yang diketahui bahwasannya sejak adanya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa merupakan wilayah otonom. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun pengaturan desa berasaskan rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi,

kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan dan keberlanjutan. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan dari adanya pengaturan tentang desa tersebut, yaitu:

1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia
3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa
4. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama
5. Membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab
6. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum
7. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional
8. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional, dan
9. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Adanya pengaturan desa memang merupakan bentuk upaya dari pemerintah untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan seperti yang sudah dijelaskan dalam tujuan pengaturan tentang desa yang disebutkan diatas. Oleh karena itu, pemerintah desa

sebagai penanggung jawab dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan desa haruslah betul-betul mengetahui apa yang menjadi kebutuhan masyarakat desa.

Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa. Pemerintah desa tersebut ialah kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Berdasarkan uraian diatas jelas bahwa dampak dari adanya pandemi *Covid-19* ini membuat banyak sektor kehidupan masyarakat mengalami perubahan. Dan pemerintah sebagai instrument dari rakyat untuk mendapatkan pelayanan yang maksimal dan sebagai penanggung jawab dalam menjalankan roda pemerintahan di sebuah wilayah yang dipimpinnya jelas harus melakukan sebuah langkah yang tepat dan berdasarkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakatnya. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana Upaya Pemerintahan Desa Dalam Pemberdayaan Ekonomi Di Masa Pandemi *Covid-19* di Kalurahan Srimartani, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan berisi pernyataan tentang indikator dan faktor-faktor yang akan diteliti secara lebih detail. Rincian aspek yang akan diteliti tersebut berguna memberikan arah dan memperjelas jalinan fenomena yang diteliti. Menurut Spradley dalam Sugiono (2014) fokus merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dengan situasi sosial. Oleh karena itu, dalam penelitian ini fokus penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pemerintahan desa di masa pandemi *Covid-19*.
2. Pelaksanaan pembangunan desa di masa pandemi *Covid-19*.
3. Pembinaan kemasyarakatan desa di masa pandemi *Covid-19*.
4. Pemberdayaan masyarakat desa di masa pandemi *Covid-19*.

C. Rumusan Masalah

Penelitian ini berfokus kepada kebijakan atau langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintahan desa dalam pemberdayaan di masa pandemi *Covid-19*. Oleh karena itu rumusan masalah yang diambil adalah: Bagaimana Upaya Pemerintahan Desa Dalam Pemberdayaan Di Masa Pandemi *Covid-19* di Kalurahan Srimartani, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul?

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya dari pemerintahan desa dalam pemberdayaan di masa pandemi *Covid-19* di Kalurahan Srimartani, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat praktis

- a. Sebagai referensi untuk pemerintahan desa dan masyarakat desa pada umumnya dan khususnya sebagai referensi untuk Pemerintahan Kalurahan dan masyarakat Kalurahan Srimartani, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Manfaat teoritis

Selain manfaat praktis yang telah dikemukakan di atas, penelitian ini juga memiliki manfaat teoritis. Manfaat teoritisnya adalah:

- a. Sebagai referensi untuk mahasiswa yang lainnya dalam melakukan penelitian yang sama.
- b. Sebagai syarat dalam menyelesaikan program studi S1 bagi peneliti.

F. Kerangka Konseptual

1. Pemerintahan

Menurut Syafiie (2011), pemerintah berasal dari kata “perintah” yang setelah ditambah awalan “pe” menjadi kata “pemerintah” dan ketika mendapat akhiran “an” menjadi kata “pemerintahan”, dalam hal ini beda antara “pemerintah” dengan “pemerintahan” adalah karena pemerintah merupakan badan atau organisasi yang bersangkutan, sedangkan pemerintahan berarti perihal ataupun hal ikhwal pemerintahan itu sendiri. Lebih lanjut Syafiie menyatakan bahwa pemerintahan adalah kelompok orang-orang tertentu secara baik dan benar serta indah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam mengkoordinasikan, memimpin dalam hubungan antara dirinya dengan masyarakat, antara departemen dan unit dalam tubuh pemerintahan itu sendiri.

Menurut Napitupulu (2012) pemerintahan adalah proses berlangsungnya kegiatan atau perubahan pemerintah dalam mengatur kekuasaan suatu negara.

Sedangkan menurut Munaf (2016), pemerintahan dalam paradigma lama memiliki objek material Negara sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradigma baru pemerintahan dipandang memiliki objek materialnya masyarakat, sehingga pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/negara.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintahan merupakan penyelenggara urusan negara yang mengatur dan mengelola urusan pemerintahan untuk kepentingan masyarakat.

2. Desa

Secara etimologi kata “Desa” berasal dari kata “Swadesi” yang berarti wilayah, tempat, atau bagian yang mandiri dan otonom. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya

sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

Menurut Widjaja (2003) desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Sementara menurut Bintarto (2010) desa merupakan suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang hidup bersama disuatu wilayah dengan memiliki tujuan hidup yang sama.

3. Pemerintahan Desa

Menurut Surasih (2002) pemerintahan desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Pemerintah desa adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa, menurut Nurcholis (2014) Pemerintah mempunyai tugas pokok:

- a. Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, membangun dan membina masyarakat.
- b. Menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan desa yang dalam menyelenggarakan urusannya harus berdasarkan pada kepentingan masyarakat desa.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemerintahan desa diselenggarakan pemerintah desa. Sedangkan pemerintah desa yang dimaksud adalah kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa. Hal ini berdasarkan penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

4. Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan secara etimologis berasal dari kata "*daya*" yang berarti mampu atau kemampuan untuk melakukan sesuatu. Mendapat awalan "*ber*" menjadi '*berdaya*' artinya berkemampuan untuk mengatasi sesuatu. Dan akhiran "*an*" sehingga menjadi "*pemberdayaan*" yang dapat diartikan sebagai usaha,

proses menjadikan untuk membuat mampu, membuat dapat bertindak atau melakukan sesuatu.

Menurut Zubaedi (2007) pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata.

Sedangkan menurut Rusli (2012) pemberdayaan merupakan aktivitas atau usaha untuk menjadikan sesuatu dari keadaan yang tidak berdaya, tidak bertenaga, tidak berkekuatan menjadi kondisi atau keadaan yang berdaya, bertenaga, atau kuat. Dan Kusnadi, dkk (2005), pemberdayaan adalah proses peningkatan kemampuan seseorang baik dalam arti pengetahuan, keterampilan, maupun sikap agar dapat memahami dan mengontrol kekuatan sosial, ekonomi, dan atau politik sehingga dapat memperbaiki kedudukannya dalam masyarakat.

Adapun pemberdayaan yang berhubungan dengan masyarakat desa dalam Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Sedangkan pemberdayaan ekonomi menurut Kartasmita (1996), merupakan pengerahan sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya alam di sekitar untuk dapat ditingkatkan produktivitasnya. Pemberdayaan ekonomi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, kemandirian, kesadaran juga meningkatkan mutu perekonomian masyarakat.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan ekonomi adalah suatu upaya yang dilakukan melalui berbagai kegiatan untuk meningkatkan keterampilan, pengembangan pengetahuan, penguatan kemampuan atau potensi yang mendukung agar dapat terciptanya keberdayaan, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tataran analisis eksplanasi. Menurut Sugiyono (2013) penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci.

Pada tingkat konseptual, pertimbangan menggunakan pendekatan kualitatif didasarkan pada 3 (tiga) alasan, yaitu: Pertama, metode kualitatif lebih fleksibel dalam menyesuaikan diri terhadap kenyataan-kenyataan ganda yang mungkin akan dijumpai dilapangan pada saat penelitian berlangsung. Kedua, pendekatan ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan peneliti dan responden (informan). Ketiga, pendekatan kualitatif ini peka dan fleksibel terhadap kemungkinan terjadinya penajaman yang dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti pola-pola dan nilai yang ditemukan di lapangan (Moleong, 1996:5).

2. Unit Analisis

Menurut Hamidi (2010), unit analisis adalah satuan yang diteliti yang bisa berupa individu, kelompok, benda atau suatu latar peristiwa sosial seperti misalnya aktivitas individu atau kelompok sebagai subjek penelitian. Oleh karena itu unit analisis dalam penelitian ini adalah pemerintahan Kalurahan Srimartani. Objek dalam penelitian ini adalah informasi mengenai upaya pemerintahan desa dalam

pemerdayaan di masa pandemi *Covid-19*. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah:

- a. Lurah/Kades : 1 orang
- b. Perangkat Desa : 7 orang
- c. Kepala Dukuh : 2 orang
- Jumlah : 10 orang

Teknik yang digunakan untuk menentukan informasi dengan cara teknik purposif, yaitu mengambil sampel sumber data berdasarkan kriteria yang dimiliki dalam penentuan informan yang relevan untuk dapat memberikan informasi mengenai upaya pemerintahan desa dalam pemberdayaan di masa pandemi *Covid-19*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2016) teknik pengumpulan data adalah suatu langkah yang dinilai strategis dalam penelitian, karena mempunyai tujuan yang utama dalam memperoleh data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah dalam memenuhi standar data yang ditetapkan. Dan berikut adalah langkah dalam teknik pengumpulan data:

a. Observasi

Menurut Riduwan (2004) observasi merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Metode observasi seringkali diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada subjek penelitian. Oleh karena itu, dalam observasi, selain peneliti melakukan pengamatan, peneliti juga melakukan proses pencatatan

secara sistematis terkait dengan keadaan pemerintahan desa dalam mengupayakan pemberdayaan di masa pandemi *Covid-19* di Kalurahan Srimartani. Hal ini dilakukan oleh peneliti sebagai pertimbangan untuk kemudian mengadakan penilaian kedalam suatu skala yang lebih lanjut.

b. Wawancara Mendalam

Menurut Bogdan (1984) wawancara mendalam adalah percakapan dua arah yang dilakukan secara langsung dan berulang antara peneliti dan subyek penelitian. Hal ini dilakukan untuk memahami pandangan subyek penelitian mengenai hidupnya, pengalamannya, ataupun situasi sosial sebagaimana diungkapkan dalam bahasanya sendiri.

Sebelum memulai wawancara, peneliti menyiapkan terlebih dahulu pedoman wawancara sesuai dengan jenis penggalian data yang diperlukan. Dalam pelaksanaan wawancara, peneliti menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang memerlukan jawaban yang nantinya berupa informasi.

c. Dokumentasi

Menurut Arikunto (2006) teknik dokumentasi merupakan mencari data sekunder mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan lain sebagainya. Pada intinya metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Oleh karena itu, dalam teknik dokumentasi peneliti melakukan penelusuran dokumen desa seperti RPJMDes serta dokumen lain yang berhubungan dengan upaya pemerintahan desa dalam pemberdayaan di masa pandemi *Covid-19*.

d. Triangulasi Data

Triangulasi data merupakan teknik yang dilakukan oleh peneliti untuk menggabungkan data dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data

yang telah ada. Menurut Sugiyono (2016:127) triangulasi data merupakan cara untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang telah dianalisis oleh peneliti menghasilkan suatu kesimpulan, selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan sumber data.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan serangkaian proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh guna untuk membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis interaktif dari Miles. Dalam teknik ini tiga komponen utama yaitu reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan yang dilakukan serentak dengan proses pengumpulan data dalam bentuk sirkus selama proses penelitian. Untuk lebih jelasnya tiga komponen dalam model analisis interaktif dari Miles dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Reduksi Data (Pengumpulan Data)

Reduksi data merupakan proses seleksi dan penyederhanaan data yang diperoleh dilapangan. Sehingga hanya data yang diperlukan dan dinilai valid yang dijadikan sumber penelitian. Tahap ini berlangsung secara terus menerus dari tahap awal sampai tahap akhir.

b. Data Display (Penyajian Data)

Data display merupakan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan penarikan kesimpulan. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah difahami (Sugiyono, 2018:137).

c. Penarikan Kesimpulan

Dari awal pengumpulan data peneliti harus sudah mulai mengerti apa arti dari hak-hak yang ditemui. Dari data yang diperoleh dari lapangan maka dapat diambil suatu kesimpulan hasil akhir (Sutopo, 2002:141).

BAB II

PROFIL KALURAHAN SRIMARTANI

A. Sejarah Kalurahan Srimartani

Kalurahan Srimartani merupakan penggabungan dari tiga Kalurahan, yaitu Kalurahan Gendongan, Kalurahan Daraman, dan Kalurahan Petir. Hal ini berdasarkan kebijakan dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX melalui maklumat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 1946. Adanya kebijakan penggabungan ini didasari karena di masa tersebut banyak desa-desa yang dianggap kecil, sehingga perlu untuk digabungkan dan nantinya akan menjadi satu desa yang besar. Disisi yang lain tujuan adanya kebijakan penggabungan ini adalah supaya otonomi pemerintahan desa dapat dijalankan dengan biaya dari kas desa itu sendiri atau adanya efisien anggaran.

Dinamika atau proses penggabungan dari beberapa kalurahan tersebut memakan waktu kurang lebih dua (2) tahun, yaitu dari tahun 1946 sampai dengan tahun 1948. Di tahun 1948, tepatnya pada tanggal 19 April 1948 proses penggabungan tersebut diselesaikan. Hal ini berdasarkan Maklumat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5/1948 tentang Perubahan Daerah-Daerah Kalurahan. Sedangkan proses penggabungan tersebut dikenal dengan istilah Blengketan.

B. Letak Geografis dan Administratif Kalurahan Srimartani

1. Batas Wilayah

Kalurahan Srimartani terletak di bagian timur Kecamatan Piyungan. Oleh karena itu Kalurahan Srimartani berbatasan dengan pegunungan Gunung Kidul. Sedangkan batasan desa, di sebelah utara, Kalurahan Srimartani berbatasan langsung dengan Desa Sumberharjo. Sedangkan di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Srimulyo. Adapun sebelah timur Kalurahan Srimartani berbatasan

dengan Desa Ngoro-oro. Dan sebelah barat berbatasan langsung dengan Desa Jogotirto.

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa Kalurahan Srimartani merupakan kalurahan yang berada ditengah dan berbatasan langsung dengan empat desa disampingnya tersebut. Oleh karena itu Kalurahan Srimartani merupakan pusat sentral pembangunan bagi keempat desa tersebut.

2. Luas Wilayah

Luas wilayah Kalurahan Srimartani sebesar 8.577.375,00 Ha. Dari total luas wilayah tersebut, wilayah Kalurahan Srimartani dibagi menjadi empat bagian lahan. Lahan pertama adalah lahan persawahan. Luas lahan persawahan di wilayah Kalurahan Srimartani adalah 4.014.995 Ha. Yang kedua adalah lahan pemukiman. Lahan pemukiman seluas 2.505.990 Ha. Yang ketiga adalah lahan hutan dan tegalan. Luas lahan hutan dan tegalan adalah 1.317.670 Ha. Dan keempat adalah lahan perkebunan dengan luas 738.720 Ha.

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwasannya sebagian besar luas wilayah Kalurahan Srimartani merupakan lahan persawahan. Ini merupakan potensi yang harus dijaga dan dikelola dengan baik dan benar sehingga kemudian dijadikan komoditas jangka panjang. Oleh karena itu dibutuhkan kerja dari berbagai pihak untuk mendukung keberlangsungan potensi tersebut.

3. Keadaan Topografi Kalurahan

Secara umum Desa Srimartani merupakan daerah yang berada di dataran rendah. Desa Srimartani juga merupakan kawasan budidaya pertanian dan juga peternakan. Selain itu desa Srimartani merupakan desa yang berkembang menjadi kawasan wisata pedesaan. Adapun iklim dan wilayah administrasi Desa Srimartani adalah sebagai berikut:

a. Iklim

Sebagaimana pada umumnya iklim yang ada di negara Indonesia yaitu iklim panas/kemarau dan juga iklim hujan/dingin, di desa Srimartani juga memiliki dua iklim, yaitu panas/kemarau dan musim hujan.

b. Wilayah Administrasi Pemerintah Kalurahan

Wilayah Administrasi Pemerintah Kalurahan Srimartani meliputi 17 Padukuhan dan 112 RT. Dan berikut adalah rinciannya:

Tabel 1. Jumlah Padukuhan, Rukun Tetangga (RT), dan Luas

Wilayahnya

| No | Padukuhan | Jumlah RT | Luas (Ha) | % |
|---------------|----------------|------------|-----------------|------------|
| 1 | Mandungan | 10 | 56,4650 | 6,94 |
| 2 | Piyungan | 10 | 31,9735 | 3,93 |
| 3 | Pos Piyungan | 6 | 84,2190 | 10,36 |
| 4 | Wanujoyo Kidul | 5 | 27,2530 | 3,35 |
| 5 | Wanujoyo Lor | 6 | 31,4100 | 3,86 |
| 6 | Munggur | 6 | 35,9070 | 4,42 |
| 7 | Mutihah | 5 | 31,5735 | 3,88 |
| 8 | Daraman | 7 | 32,9240 | 4,05 |
| 9 | Kwasen | 5 | 60,3900 | 7,43 |
| 10 | Mojosari | 5 | 57,4750 | 7,07 |
| 11 | Kembangsari | 10 | 48,0100 | 5,90 |
| 12 | Petir | 9 | 29,4575 | 3,62 |
| 13 | Sanansari | 7 | 37,0900 | 4,56 |
| 14 | Bulusari | 6 | 58,7720 | 7,23 |
| 15 | Rejosari | 7 | 72,0850 | 8,86 |
| 16 | Kemloko | 4 | 29,1552 | 3,59 |
| 17 | Umbulsari | 4 | 79,34909 | 4,76 |
| Jumlah | 17 | 112 | 813,1960 | 100 |

Sumber : Buku Monografi Kalurahan Srimartani 2021

Dari data pada tabel diatas menunjukkan bahwa wilayah administrasi Pemerintah Kalurahan Srimartani meliputi 17 Padukuhan dan 112 RT. Disetiap padukuhan ada padukuhan yang jumlah RTnya sama juga ada yang jumlah RTnya berbeda. Disisi yang lain, kebanyakan padukuhan yang jumlah RTnya cukup sedikit memiliki luas wilayah yang cukup besar dibandingkan padukuhan yang memiliki jumlah RT yang cukup banyak. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwasannya jumlah RT tidak ditentukan oleh luasnya wilayah padukuhan. Begitupun sebaliknya, luas wilayah padukuhan tidak menentukan banyaknya jumlah RT.

C. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk

1. Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk di Kalurahan Srimartani adalah 15.684 jiwa. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah Penduduk

| No | Jenis Kelamin | Jumlah Jiwa | % |
|----|---------------|-------------|-----|
| 1 | Laki-laki | 7.424 | 52 |
| 2 | Perempuan | 8.260 | 48 |
| 3 | Total | 15.648 | 100 |

Sumber: Buku Monografi Kalurahan Srimartani 2021

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa tingkat pertumbuhan penduduk di Kalurahan Srimartani lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Hal ini merupakan salah satu potensi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat tanpa bermaksud melakukan ketimpangan gender dengan mengadakan pemberdayaan

kepada kelompok perempuan. Adapun jumlah KK di Kalurahan Srimartani sebanyak 3.836 KK.

2. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

Dari total jumlah KK yang ada di Kalurahan Srimartani yaitu 3.836 KK, jumlah keluarga yang berada di garis kemiskinan sebanyak 1.370 KK. Sedangkan keluarga dengan keadaan ekonomi menengah keatas sebanyak 2.466 KK. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwasannya tingkat kesejahteraan masyarakat di desa Srimartani cukup baik.

3. Tingkat Pendidikan

Tabel 3. Tingkat Pendidikan Masyarakat Kalurahan Srimartani

| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah | Presentase |
|--------------|--------------------|--------------|------------|
| 1 | SD | 2.047 | 20 |
| 2 | SMP | 2.379 | 25 |
| 3 | SLTA/SMA | 3.989 | 45 |
| 4 | D3 | 261 | 2 |
| 5 | Sarjana | 729 | 8 |
| Total | | 9.405 | 100 |

Sumber: Buku Monografi Kalurahan Srimartani 2021

Dari data pada tabel diatas menunjukkan bahwa total penduduk Kalurahan Srimartani yang menempuh pendidikan dengan masing-masing tingkatan pendidikan sebanyak 9.405. Ini merupakan potensi yang harus terus didukung untuk kemajuan Kalurahan Srimartani. Adapun jumlah penduduk Kalurahan Srimartani yang tidak sekolah sebanyak 6.243 jiwa. Keadaan ini perlu perhatian khusus dari pemerintah setempat maupun masyarakat untuk sama-sama kedepannya mendorong generasi muda supaya semangat dalam berpendidikan. Karena pendidikan merupakan hal sangat penting untuk keberlangsungan kehidupan

bernegara. Dan untuk masyarakat yang sudah terlanjur tidak sekolah perlu ada pemberdayaan tersendiri dari pemerintahan Kalurahan Srimartani. Ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat.

4. Pekerjaan

Tabel 4. Pekerjaan Masyarakat Desa Srimartani

| No | Pekerjaan | Jiwa | Presentase |
|---------------|-----------------|---------------|------------|
| 1 | Petani | 9.724 | 62 |
| 2 | Buruh tani | 538 | 10 |
| 3 | Peternak | 185 | 2 |
| 3 | PNS/TNI/POLRI | 1.275 | 20 |
| 4 | Swasta | 293 | 4 |
| 5 | Pensiunan | 344 | 4 |
| 6 | Pedagang | 92 | 10 |
| 7 | Tukang Bangunan | 424 | 4 |
| 8 | Jasa | 91 | 1 |
| Jumlah | | 12.968 | 100 |

Sumber: Buku Monografi Kalurahan Srimartani 2021

Dari data pada tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Kalurahan Srimartani berprofesi atau bekerja sebagai petani. Banyaknya masyarakat yang bekerja sebagai petani juga didukung dengan luasnya lahan persawahan yang ada di Kalurahan Srimartani. Dengan keadaan seperti ini tentunya pemerintahan desa harus melakukan pemberdayaan kepada masyarakat berkaitan dengan pengelolaan pertanian. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan penghasilan masyarakat.

5. Hewan Ternak

Keberadaan hewan ternak di Kalurahan Srimartani cukuplah banyak. Dan bermacam-macam jenis. Berikut adalah rinciannya:

Tabel 5. Hewan Ternak

| No | Hewan Ternak | Jumlah/Ekor | Presentase |
|--------------|--------------|---------------|------------|
| 1 | Sapi | 1.225 | 6,10 |
| 2 | Kerbau | 7 | 0,03 |
| 3 | Kambing | 1.567 | 7,81 |
| 4 | Ayam Ras | 6.000 | 30 |
| 5 | Ayam Kampung | 11.255 | 56,6 |
| Total | | 20.054 | 100 |

Sumber: Buku Monografi Kalurahan Srimartani 2021

Dari data pada tabel diatas menunjukkan bahwa hewan ternak di Kalurahan Srimartani paling banyak adalah hewan ternak ayam, dengan jumlah 11.054 ekor. Dan hewan ternak paling sedikit adalah kerbau dengan jumlah 7 ekor. Tetapi, terlepas dari jumlahnya, disisi yang lain jika keberadaan hewan ternak ini dikelola dengan baik maka akan bisa menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan kerja sama antara masyarakat dan pemerintah desa.

6. Potensi Sumber Daya Alam

Kalurahan Srimartani memiliki potensi sumber daya alam yang cukup banyak dan juga luas. Diantaranya adalah lahan hutan dan tegalan dengan luas 1.317.670 Ha. Selain itu, di Kalurahan Srimartani juga memiliki lahan persawahan dengan luas 4.014.995 Ha. Dan juga lahan perkebunan dengan luas 738.720 Ha. Dan berikut adalah penghasilan dari pengelolaan lahan yang ada di Kalurahan Srimartani :

- a. Padi : 12 ton/Th/Ha
- b. Ketela : 9.6 Ton/Th/Ha
- c. Jagung : 5.4 Ton/Th/Ha
- d. Kacang Tanah : 2.3 Ton/Th/Ha
- e. Kedelai : 1.2 Ton/Th/Ha

Keberadaan semua potensi ini jika dikelola dengan baik dan benar maka akan bisa memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan kerja sama dari berbagai pihak baik itu pemerintah, swasta maupun masyarakat. Pemerintah sebagai fasilitatornya harus mengadakan pemberdayaan maupun pembinaan kepada masyarakat. Dengan begitu akan berpengaruh pada penghasilan sumber daya alam yang ada dan juga ekonomi masyarakat desa.

7. Potensi Lainnya Yang Ada di Kalurahan Srimartani

Di Kalurahan Srimartani, selain memiliki potensi pertanian dan peternakan yang cukup besar dan banyak, ada juga potensi yang lainnya, yaitu potensi rumah industri. Dan berikut adalah beberapa jenis home industri yang ada di Kalurahan Srimartani:

- a. Home Industri Tempe : 10 unit
- b. Home Industri Tahu : 5 unit
- c. Home Industri Criping : 5 unit
- d. Home Industri Peyek : 5 unit
- e. Home Industri Ikan Tawar : 6 unit

Keberadaan home industri di Kalurahan Srimartani dapat dijadikan potensi lapangan pekerjaan guna untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa. Disisi yang lain keberadaan rumah Industri ini perlu untuk dikelola dengan baik. Dan tentunya perlu ada juga dukungan dari pemerintah setempat. Oleh karena itu, kerja sama dari berbagai pihak merupakan hal yang sangat penting adanya guna untuk memajukan potensi home industri tersebut.

D. Kondisi Sarana dan Prasarana

Keberadaan sarana dan prasarana disebuah wilayah merupakan penunjang untuk mendukung kegiatan yang ada dilingkungan masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan sarana dan prasarana disebuah wilayah sangatlah penting adanya. Dan berikut adalah kondisi sarana dan prasarana yang ada di Kalurahan Srimartani:

1. Balai Desa : 1 buah
2. Gedung Serba Guna : 1 buah
3. Sekolah
 - a. PAUD : 10 buah
 - b. TK : 13 buah
 - c. SD : 6 buah
 - d. SMP : 4 buah
 - e. SLTA : 3 buah
4. Puskesmas Pembantu : 1 buah
5. KORAMIL : 1 buah
6. KUA : 1 buah
7. BPP : 1 buah
8. Insiminator Sapi : 1 buah
9. Kantor pengairan : 1 buah
10. PDAM : 1 buah
11. Balai Benih Pembantu : 1 buah
12. SPBU : 1 buah
13. Jalan Desa : belum terdata
14. Jalan Kabupaten : 5 Km
15. Jembatan : 7 buah
16. Saluran Irigasi : 28 buah

- 17. Dam
 - a. Bendungan : 1 buah
 - b. Parit : 1 buah
 - c. Pengendali Lereng : 2 buah
- 18. Lapangan Olah raga : 1 buah

- 19. Masjid : 32 buah
- 20. Mushola : 61 buah
- 21. Madrasah Diniyah : 9 buah
- 22. TPA : 22 buah
- 23. Kantor Lembaga Agama : 1 buah
- 24. Pasar : 1 buah

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwasannya keberadaan sarana dan prasarana di Desa Srimartani cukuplah maju. Hal ini tentunya tidak terlepas dari peran pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam menunjang keberadaan sarana dan prasarana yang ada di Desa Srimartani.

E. Pemerintahan Kalurahan

1. Pemerintah Kalurahan Srimartani

Tabel 6. Pemerintah Kalurahan Srimartani Periode 2018-2024

Tabel 6. Pemerintahan Kalurahan Srimartani Periode 2018-2024

| No | Nama | Jabatan | Pendidikan |
|----|---------------------|--------------------------|------------|
| 1 | H. Mulyana | Lurah/Kepala Desa | D3 |
| 2 | Eko Herri Purwanto | Sekretaris | S1 |
| 3 | Gunanjar | Ka. Sie Pemerintahan | SLTA |
| 4 | Suratman | Ka. Sie Kesejahteraan | SLTA |
| 5 | Isbandiyo | Kaur Tata Usaha dan Umum | SLTA |
| 6 | Tugito | Kaur Keuangan | SLTA |
| 7 | Jumadi | Ka. Sie Pelayanan | SLTA |
| 8 | Lilik Raharjo | Kaur Perencanaan | SLTA |
| 9 | Mujiyati | Dukuh Pos Piyungan | SMP |
| 10 | Yunianta | Dukuh Mandungan | SLTA |
| 11 | Awali | Dukuh Kwasen | SLTA |
| 12 | Panggih Raharjo | Dukuh Wanujoyo Kidul | SLTA |
| 13 | Syamsul Arifin | Dukuh Daraman | SLTA |
| 14 | Jumali | Dukuh Kemloko | SLTA |
| 15 | Koco Widagdo | Dukuh Mojosari | SLTA |
| 16 | Tony Subagyo | Dukuh Piyungan | S1 |
| 17 | Zainal Arifin | Dukuh Wanujoyo Lor | SLTA |
| 18 | Ahmad Mujab Isnadi | Dukuh Kembangsari | SLTA |
| 19 | Sumadi | Dukuh Petir | SLTA |
| 20 | Syarief Nur Hidayat | Dukuh Munggur | SLTA |
| 21 | Suharno | Dukuh Mutihan | SLTA |
| 22 | Mugiman | Dukuh Sanansari | SLTA |

Sumber: Buku Monografi Kalurahan Srimartani 2021

Dari data struktur pemerintah Kalurahan periode 2018-2024 pada tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan pemerintah desa Srimartani sebagian besar lulusan SLTA/SMA, dengan jumlah 18 orang. Sedangkan untuk lulusan S1 hanya 2 orang. Adapun lulusan D3 dan SMP masing-masing 1 orang. Hal ini dapat

disimpulkan bahwa struktur pemerintah desa berdasarkan tingkat pendidikan cukuplah baik. Dan ini merupakan hal yang positif adanya. Karena untuk memajukan desa agar menjadi desa mandiri dan berdaya saing tentunya diperlukan pengetahuan yang memadai.

2. Visi dan Misi Pemerintah Kalurahan Srimartani

a. Visi

Visi Pemerintah Pemerintahan Srimartani seperti yang tertuang dalam RPJMDes periode 2018-2024 adalah sebagai berikut:

“Terbentuknya Pemerintahan Desa yang bersih dan berwibawa, akuntable dan transparan untuk mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri, sehat, sejahtera lahir batin yang agamis dan dinamis”.

b. Misi

Misi Pemerintah Desa Srimartani seperti yang tertuang dalam RPJMDes periode 2018-2024 adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan koordinasi secara rutin untuk mengoptimalkan kinerja pamong desa, lembaga desa dan elemen masyarakat untuk lebih memacu segala daya usaha dan upaya membangun desa dengan mengedepankan potensi SDM dan SDA yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
NYAWIJI KANGGO SRIMARTANI
2. Menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat untuk pembangunan desa secara menyeluruh dengan berdasarkan undang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum Negara, adat/masyarakat yang berlaku untuk melaksanakan pembangunan yang merata di berbagai bidang antara lain :
 - a. Kesehatan
 - b. Pendidikan

- c. Pemerintahan
- d. Peningkatan Ekonomi Masyarakat
- e. Perbaikan Infrastruktur
- f. Seni dan Budaya
- g. Pemuda, Olah raga dan Pariwisata

3. Susunan Pengurus PKK Kalurahan Srimartani

Tabel 7. Susunan Pengurus PKK Desa Srimartani

| No | Nama | Jabatan | Alamat |
|----|---------------------------|--------------------|---|
| 1 | Siti Amronah, S.Pd | Ketua TP PKK | Wanujoyo Lor RT 03 Srimartani Piyungan Bantul |
| 2 | Siti Aisyah | Wakil Ketua 1 | Munggur Srimartani Piyungan Bantul |
| 3 | Sri Widayanti | Wakil Ketua 2 | Kwasen RT 05 Srimartani Piyungan Bantul |
| 4 | Titik Dwi Nurhayati | Wakil Ketua 3 | Piyungan RT 09 Srimartani Piyungan Bantul |
| 5 | Sri Martuti | Wakil Ketua 4 | Kembangsari RT 04 Srimartani Piyungan Bantul |
| 6 | Anik Retnawati, S.Pd | Sekretaris | Mojosari RT 03 Srimartani Piyungan Bantul |
| 7 | Intartiyani, S.Pd | Wakil Sekretaris 1 | Mandungan Srimartani Piyungan Bantul |
| 8 | Fatatul Muniroh | Wakil Sekretaris 2 | Kwasen Srimartani Piyungan Bantul |
| 9 | Margiyanti | Wakil Sekretaris 3 | Kwasen RT 03 Srimartani Piyungan Bantul |
| 10 | Widiyanti | Bendahara | Mandungan Srimartani Piyungan Bantul |
| 11 | Ratmini | Wakil Bendahara 1 | Kemloko RT 02 Srimartani Piyungan Bantul |
| 12 | Nugraheni Nita Dian Raida | Wakil Bendahara 2 | Pos Piyungan, Srimartani Piyungan Bantul |
| 13 | Siti Nuriyah | Ketua Pokja 1 | Wanujoyo Lor Srimartani Piyungan Bantul |
| 14 | Nurul Hidayah | Sekretaris Pokja 1 | Wanujoyo Lor RT 03 Srimartani Piyungan Bantul |
| 15 | Tuminah | Bendahara Pokja 1 | Wanujoyo Kidul Srimartani Piyungan Bantul |
| 16 | Anis Widayanti | Anggota Pokja 1 | Petir RT 03 Srimartani Piyungan Bantul |
| 17 | Rini Nur Azizah | Anggota Pokja 1 | Daraman RT 04 Srimartani Piyungan Bantul |
| 18 | Sumiyatun | Anggota Pokja 1 | Daraman RT 03 Srimartani Piyungan Bantul |
| 19 | Uun Laila Baroroh, S.Pd | Ketua Pokja 2 | Wanujoyo RT 06 Srimartani Piyungan Bantul |
| 20 | Siti Mahmudah | Sekretaris Pokja 2 | Mojosari Srimartani Piyungan Bantul |
| 21 | Sugiyem | Bendahara Pokja 2 | Sanansari RT 05 Srimartani Piyungan Bantul |
| 22 | Yuni Astuti | Anggota Pokja 2 | Mojosari RT 01 Srimartani Piyungan Bantul |

| | | | |
|----|---------------------|--------------------|---|
| 23 | Prapti Ganetri | Anggota Pokja 2 | Wanujoyo Kidul RT 02 Srimartani |
| 24 | Umahatun | Anggota Pokja 2 | Wanujoyo lor Srimartani Piyungan Bantul |
| 25 | Sri Haryati | Anggota Pokja 2 | Mojosari RT 01 Srimartani Piyungan Bantu |
| 26 | Budi Setyowati | Anggota Pokja 2 | Kembangsari Srimartani Piyungan |
| 27 | Arni Sulasmi | Ketua Pokja 3 | Mandungan RT 01 Srimartani Piyungan Bantul |
| 28 | Hepy Nur Ardianis | Sekretaris Pokja 3 | Daraman RT 04 Srimartani Piyungan Bantul |
| 29 | Siti Nurani | Bendahara Pokja 3 | Gedongan RT 07 Srimartani Piyungan Bantul |
| 30 | Sudarsih | Anggota Pokja 3 | Munggur RT06 Srimartani Piyungan Bantul |
| 31 | Rina Hapsari | Anggota Pokja 3 | Sanansari RT 07 Srimartani Piyungan Bantul |
| 32 | Siti Aminah | Anggota Pokja 3 | Umbulsari RT 02 Srimartani Piyungan Bantul |
| 33 | Sartini | Anggota Pokja 3 | Umbulsari RT 03 Srimartani Piyungan Bantul |
| 34 | Tunik Indah Melani | Anggota Pokja 3 | Piyungan Srimartani Piyungan Bantul |
| 35 | Sukani, S.ST.M.Kes | Ketua Pokja 4 | Munggur Srimartani Piyungan Bantul |
| 36 | Musitini | Sekretaris Pokja 4 | Rejosari Rt 05 Srimartani Piyunagn Bantul |
| 37 | Jumarni | Bendahara Pokja 4 | Pos Piyungan RT 03 Srimartani Piyungan Bantul |
| 38 | Sri Niyati | Anggota Pokja 4 | Wanujoyo Kidul RT 03 Srimartani Piyungan Bantul |
| 39 | Nur Sangadah | Anggota Pokja 4 | Petir RT 03 Srimartani Piyungan Bantul |
| 40 | Rofianingsih | Anggota Pokja 4 | Wanujoyo Kidul RT 03 Srimartani Piyungan Bantul |
| 41 | Puji Arum Sari | Anggota Pokja 4 | Kembangsari Srimartani Piyungan Bantul |
| 42 | Sumarti | Anggota Pokja 4 | Rejosari Rt 05 Srimartani Piyungan Bantul |
| 43 | Lutfie Enggarwati | Anggota Pokja 4 | GTS I Mandungan Srimartani |
| 44 | Syafangati Diniyati | Anggota Pokja 4 | Kembangsari Srimartani Piyungan Bantul |
| 45 | Suciyati | Anggota Pokja 4 | Petir Srimartani Piyungan Bantul |
| 46 | Yuniasih | Anggota Pokja 4 | Tambalan Srimartani Piyungan bantul |

Sumber: Buku Monografi Kalurahan Srimartani 2021

F. Keuangan Kalurahan

1. Pendapatan Kalurahan Srimartani

Tabel 8. Pendapatan Kalurahan Srimartani

Tabel 8. Pendapatan Kalurahan Srimartani

| Rincian | Rp |
|---------------------------|-------------------------|
| Pendapatan Asli Kalurahan | 175.209.250,00 |
| Pendapatan Transfer | 5.212.226.900,00 |
| Pendapatan Lain-lain | 13.253.627,00 |
| Total Pendapatan | 5.400.689.777,00 |

Sumber : Buku Monografi Kalurahan Srimartani 2021

Dari data pada tabel diatas menunjukkan bahwa total pendapatan Kalurahan Srimartani adalah Rp. 4.742.809.780,00. Dan dari beberapa sumber pendapatan Kalurahan Srimartani tersebut, pendapatan transfer merupakan pendapatan yang paling banyak jumlahnya.

2. Belanja Kegiatan Kalurahan

Program kerja pemerintah Kalurahan Srimartani tahun anggaran 2021 beserta anggaran program dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 9. Belanja Kegiatan Kalurahan

Tabel 9. Belanja Kegiatan Kalurahan

| No | Item | Anggaran/Rp |
|-----------|--|-------------------------|
| 1 | BIDANG PENYELENGGARAAN KALURAHAN | 2.354.387.377,00 |
| 2 | Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Kalurahan | 1.866.959.188,00 |
| 3 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintah Kalurahan | 14.400.000,00 |
| 4 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Kearsipan | 25.585.000,00 |
| 5 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 422.442.670,00 |
| 6 | Sub. Bidang Pertanahan | 25.000.562,00 |
| 7 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KALURAHAN | 2.608.177.855,00 |
| 8 | Sub. Bidang Pendidikan | 37.480.000,00 |
| 9 | Sub. Bidang Kesehatan | 342.510.000,00 |
| 10 | Sub. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.230.385.855,00 |
| 11 | Sub. Bidang Kawasan Permukiman | 959.500.000,00 |
| 12 | Sub. Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 5.350.000,00 |
| 13 | Sub. Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 17.652.000,00 |
| 14 | Sub. Bidang Pariwisata | 15.300.000,00 |
| 15 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 276.989.800,00 |
| 16 | Sub. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 164.497.400,00 |
| 17 | Sub. Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 65.580.000,00 |
| 18 | Sub. Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 17.841.600,00 |
| 19 | Sub. Bidang Kelembagaan Masyarakat | 29.070.800,00 |
| 20 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 159.990.000,00 |
| 21 | Sub. Bidang Pertanian dan Peternakan | 5.350.000,00 |
| 22 | Sub. Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Kalurahan | 105.050.000,00 |
| 23 | Sub. Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 39.040.000,00 |
| 24 | Sub. Bidang Koperasi, UMKM | 10.550.000,00 |
| 25 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK KALURAHAN | 103. 644.745,00 |

| | | |
|-----------|--|-------------------------|
| 26 | Sub. Bidang Penanggulangan Bencana | 63.044.745,00 |
| 27 | Sub. Bidang Darurat | 5.000.000,00 |
| 28 | Sub. Bidang Mendesak | 35.600.000,00 |
| 29 | JUMLAH BELANJA | 5.503.189.777,00 |
| 30 | SURPLUS/DEFISIT | 102.500.000,00 |
| 31 | PEMBIAYAAN | 102.500.000,00 |
| 32 | SISAH LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN | 0,00 |

Sumber: Buku Monografi Kalurahan Srimartani 2021

G. Lembaga Kalurahan dan Lembaga Lainnya

Kalurahan Srimartani menganut sistim kelembagaan pemerintahan pola minimal. Dan berikut adalah beberapa lembaga yang ada di Kalurahan Srimartani

Tabel 2.10. Lembaga Kalurahan dan Lembaga Lainnya

| No | Lembaga | Jumlah Orang |
|----|----------------------------|--------------|
| 1 | LPMD | 36 orang |
| 2 | Kader Pembangunan Desa | 17 orang |
| 3 | Tim Penggerak PKK | 60 orang |
| 4 | Kader PKK | 49 orang |
| 5 | Anggota BPD | 9 orang |
| 6 | Karang Taruna | 51 orang |
| 7 | P3A | 35 orang |
| 8 | GAPOKTAN | 35 orang |
| 9 | Pengurus Lansia | 25 orang |
| 10 | IPHI | 20 orang |
| 11 | Kader Jumantik | 105 orang |
| 12 | Kader Posyandu | 105 orang |
| 13 | Kader KB | 115 orang |
| 14 | Pengurus Normalisasi Jalan | 20 orang |
| 15 | PAMSIMAS | 3 kelompok |

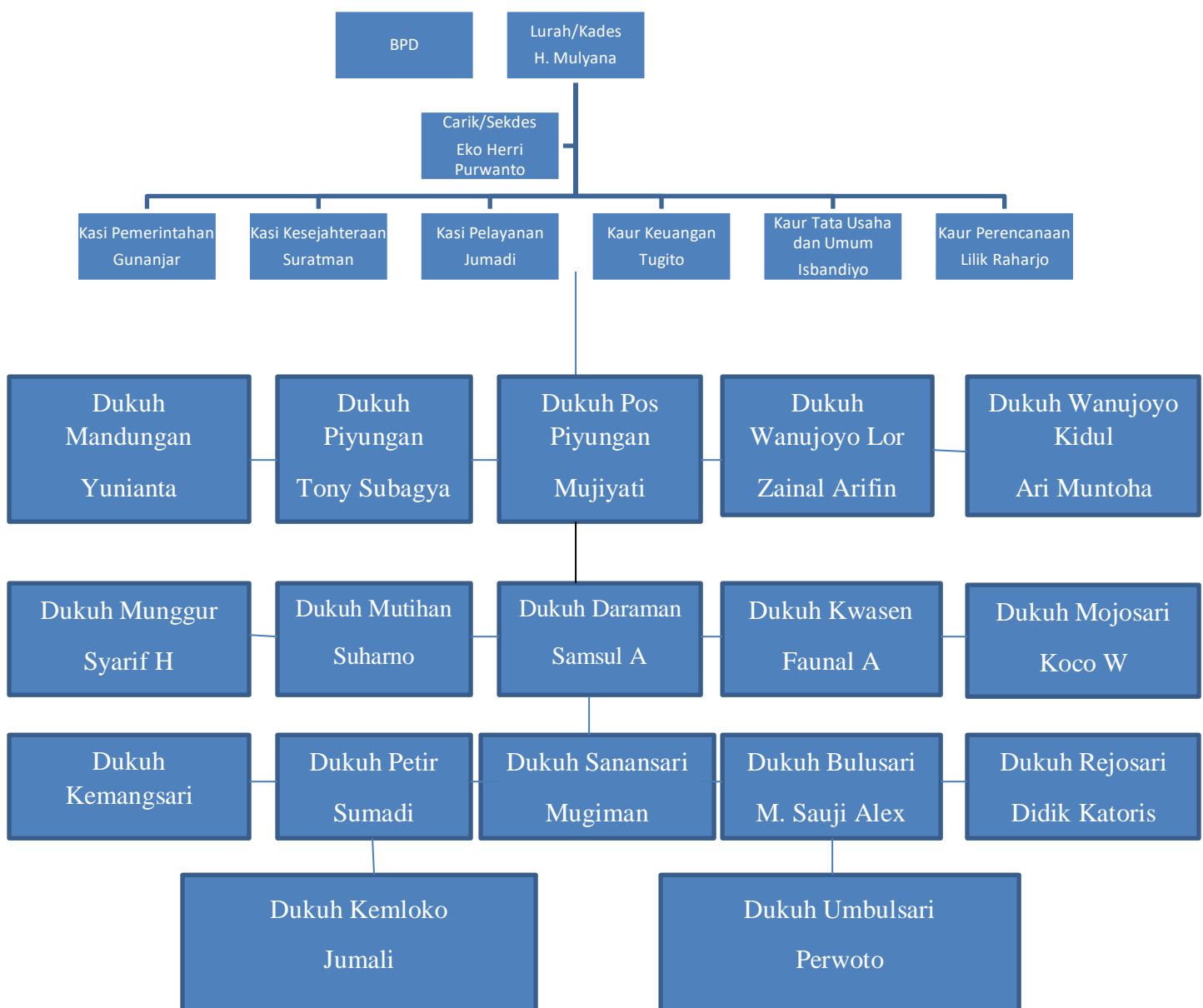
| | | |
|----|-----|--------|
| 16 | LKM | 2 unit |
|----|-----|--------|

Sumber: Buku Monografi Kalurahan Srimartani 2021

H. Struktur Pemerintahan Kalurahan Srimartani

Kalurahan Srimartani di pimpin oleh seorang Lurah dan di bantu oleh perangkat Kalurahan yang bertanggungjawab terhadap jalannya roda pemerintahan di Kalurahan. Dan berikut adalah struktur pemerintahan Kalurahan Srimartani:

Struktur Pemerintahan Kalurahan Srimartani



Sumber: Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan Srimartani periode 2018-2024

Daftar Pustaka

- Lexy J. Moleong. (1993). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Agusta, (2003). *Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif*. Bogor: PT. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian.
- Arikunto, Suharsimi, (2006). *Metode Penelitian Suatu Tindakan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Zubaedi, (2007). *Wacana Pembangun Alternatif: Ragam Prespektif Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT. Ar Ruzz Media.
- Yusuf, Muri. (2017). *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan)*. Jakarta: PT. Kencana
- Agustin (2017). *Dampak Sosial dan Ekonomi Kebijakan Pembangunan Kawasan Mix Use di Kecamatan Jabon*. Sidoarjo: PT. Prodi Ilmu Administasi Negara - FISIP Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
- Inu Kencana Syafiie (2018). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung. Refika Aditama
- Sugiyono, (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. ALFABETA
- Sugiman, (2018). *Pemerintahan Desa*. Fakultas Hukum Universitas Suryadarma: PT. Binamulia Hukum
- Wekke, dkk , (2019). *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: PT. Adi Karya Mandiri
- Sasauw, dkk. (2020). *Tata Kelola Pemerintahan Dalam Pengembangan Desa Perbatasan*. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 2 N0.5 Tahun 2020*. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi
- Yayat Rukayat. (2021). *Manajemen Pemerintahan Desa dan Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta: PT. Bee Media Pustaka
- Sihombing, dkk. (2021). *Hukum Pemerintahan Desa*. Medan: PT. Enam Media

Sumber Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- PP Nomor 23 Tahun 2020 tentang Program Pemulihan Ekonomi Nasional
- PP Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP Nomor 23 Tahun 2020 tentang Program Pemulihan Ekonomi Nasional
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang PPKM